

TRANSFORMASI VISI POLITIK MELALUI ERA DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL

Nanik Kusmiati Putri^{1*}

^{1*} Universitas PGRI Delta Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia

nanikkusmiput1104@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received: 2025-09-28

Revised: 2025-10-09

Accepted: 2025-10-15

Keyword:

Digitalization of Political Communication;
Interactive Political Vision;
Social Media and Public Participation.

ABSTRACT (English)

The shift from traditional media to digital platforms has had a significant impact on politics and political vision. Traditional media, such as direct speech, print, television, and radio, are one-way, allowing politicians to convey messages to the public without direct interaction. This study aims to explore the role of digitalization and social media in changing communication patterns and implementing political visions, as well as to provide academic and practical insights into political communication strategies in the digital era. This study uses a descriptive qualitative approach to understand the concept of political vision, changes in political communication in the digital era, and the influence of social media on political visions in Indonesia. The digital era and social media have significantly transformed political visions, making them more interactive and accessible. This shift has strengthened the role of political visions as strategic guidelines, sources of government legitimacy, and instruments for public participation in political life.

How to Cite:

Putri, N. K. (2025). TRANSFORMASI VISI POLITIK MELALUI ERA DIGITAL DAN MEDIA SOSIAL. *Cabinet: Journal of Social, Politics and Government*, 1(1), 23-30. <https://doi.org>.



<https://doi.org/>

This is an open access article under the CC-BY license



INTRODUCTION

Pergeseran dari media tradisional ke platform digital telah berdampak signifikan terhadap politik dan visi politik. Media tradisional, seperti pidato langsung, media cetak, televisi, dan radio, bersifat satu arah, memungkinkan politisi menyampaikan pesan kepada publik tanpa interaksi langsung. Era digital telah menggantikan metode tradisional ini dengan media sosial dan platform berbasis internet, yang memungkinkan komunikasi dua arah antara politisi dan publik. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan

YouTube telah menjadi saluran utama untuk kampanye dan komunikasi politik, yang memungkinkan politisi membangun interaksi langsung dengan pemilih, menyampaikan pesan yang dipersonalisasi, dan berkampanye dengan biaya lebih rendah. Fitur streaming langsung pada platform seperti TikTok dan YouTube memungkinkan interaksi langsung dengan publik, termasuk generasi muda. Media sosial juga memungkinkan mobilisasi massa yang lebih cepat melalui konten viral, tagar kampanye, dan organisasi daring.

Demokratisasi dan partisipasi politik telah menjadi lebih inklusif, memungkinkan suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan untuk didengar. Partisipasi politik kini meluas melampaui pemilihan umum dan pertemuan tatap muka ke aktivitas daring seperti diskusi, petisi, dan kampanye digital. Namun, tantangan seperti penyebaran informasi palsu, polarisasi opini, dan manipulasi data menimbulkan tantangan serius dalam komunikasi politik digital. Influencer media sosial kini memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, terutama di kalangan pemilih muda. Transformasi ini mengubah lanskap politik dari komunikasi tertutup dan top-down menjadi komunikasi interaktif, partisipatif, dan cepat melalui media sosial, menciptakan dinamika politik yang lebih inklusif dan responsif.

Komunikasi politik konvensional melibatkan pesan satu arah dan terstruktur yang disampaikan melalui saluran media tradisional seperti pidato tatap muka, media cetak, radio, dan televisi. Pesan-pesan ini kaku dan kaku, dengan sedikit interaksi. Di sisi lain, komunikasi politik digital memungkinkan politisi untuk berkomunikasi dan merespons publik secara langsung melalui media sosial, yang dirancang lebih kreatif dan personal untuk menarik beragam audiens. Teknologi digital memfasilitasi pemetaan audiens yang akurat berdasarkan pengikut dan pelanggan.

Partisipasi politik konvensional terbatas, dengan metode pasif seperti pemilihan umum fisik dan media massa yang menyulitkan publik untuk memberikan umpan balik atau berinteraksi dengan politisi. Pendekatan elitis terhadap partisipasi politik ini bersifat elitis dan terbatas pada kelompok tertentu. Komunikasi politik digital menawarkan partisipasi yang lebih inklusif dan luas, memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi melalui media sosial, diskusi daring, petisi digital, dan penggalangan dana. Hal ini memungkinkan umpan balik langsung, penyebaran informasi politik yang cepat, dan pengorganisasian gerakan politik secara daring.

Komunikasi politik digital meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kendali publik atas para pemimpin politik, mengubah pola pesan menjadi lebih interaktif, kreatif, dan personal. Pergeseran dalam komunikasi politik ini memungkinkan partisipasi yang lebih luas, lebih aktif, dan inklusif dibandingkan dengan komunikasi konvensional yang bersifat satu arah dan terbatas pada partisipasi publik yang pasif. Era digital dan media sosial telah berdampak signifikan terhadap visi politik, partisipasi publik, dan arah kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran digitalisasi dan media sosial dalam

mengubah pola komunikasi dan mengimplementasikan visi politik, serta memberikan wawasan akademis dan praktis mengenai strategi komunikasi politik di era digital.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami konsep visi politik, perubahan komunikasi politik di era digital, dan pengaruh media sosial terhadap visi politik di Indonesia. Sumber data meliputi wawancara mendalam dengan politisi, pengelola kampanye digital, aktivis, dan pengguna, serta studi literatur dan dokumentasi tentang komunikasi politik digital, strategi kampanye digital, big data dalam politik, dan dinamika media sosial. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipan terhadap aktivitas kampanye digital, dan studi dokumen serta analisis isi kampanye politik digital dan pernyataan visi politik. Penelitian ini menggunakan analisis isi untuk menganalisis pesan politik dan respons publik, analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait perubahan pola komunikasi, dan analisis naratif untuk mengeksplorasi cerita dan narasi yang membentuk persepsi publik dan politisi tentang perubahan komunikasi politik di era digital.

RESULT AND DISCUSSION

Konsep Dasar Visi Politik

Visi politik adalah gambaran cita-cita dan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu kelompok, organisasi, atau bangsa dalam kehidupan politiknya. Visi berfungsi sebagai pedoman utama bagi gerakan dan pembangunan politik, merumuskan cita-cita ideal, dan membentuk fondasi bagi perumusan kebijakan dan strategi politik. Visi politik bersumber dari pemikiran normatif, filsafat politik, dan komitmen terhadap nilai-nilai serta prinsip-prinsip tertentu. Visi politik secara signifikan menentukan arah keseluruhan kebijakan nasional, ideologi, dan strategi pembangunan. Visi politik menjadi dasar pemilihan kebijakan dan keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah, mengintegrasikan nilai-nilai ideologis ke dalam program pembangunan nasional, membantu merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan, terencana, dan berkelanjutan, serta menjadi acuan dalam perumusan undang-undang dan kerangka regulasi pembangunan jangka panjang.

Fungsi visi politik meliputi membangun legitimasi, menjaga stabilitas, dan meningkatkan partisipasi politik. Visi politik yang jelas merupakan fondasi bagi legitimasi pemerintah, yang memungkinkan rakyat menilai legitimasi kekuasaan berdasarkan kesesuaian pencapaian visi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang disepakati. Arah politik yang jelas mengurangi ketidakpastian dan konflik, serta

mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, visi politik merupakan komponen sentral teori politik, yang memainkan peran vital dalam memandu kebijakan, menyatukan ideologi, dan mengembangkan strategi. Visi politik membantu membangun legitimasi rezim, menjaga stabilitas nasional, dan mengoptimalkan partisipasi politik warga negara dalam pembangunan bangsa.

Beberapa pendapat sebelumnya tentang visi dan komunikasi politik di Indonesia telah menunjukkan bahwa hal itu terkait erat dengan karakter dan nilai-nilai moral yang ingin diwujudkan oleh sebuah organisasi politik. Misalnya, Program Studi Ilmu Politik di Universitas Andalas bertujuan untuk membangun karakter yang bermartabat dan unggul sebagai landasan bagi pengembangan sumber daya manusia dan pengetahuan politik. Partai-partai politik baru di Indonesia harus mengomunikasikan visi politik mereka dengan jelas untuk menarik dukungan publik dan memastikan penerimaan publik dan efektivitas dalam memenangkan pemilihan. Penelitian tentang partisipasi politik juga menunjukkan bahwa kesadaran dan keterlibatan publik dipengaruhi oleh representasi dan sosialisasi visi politik, meningkatkan partisipasi aktif dalam demokrasi, terutama di kalangan pemilih muda dan kelompok yang kurang terwakili. Strategi pemasaran dan komunikasi politik yang didasarkan pada visi yang jelas sangat penting bagi keberhasilan partai politik dalam mendapatkan dukungan pemilih dan mempertahankan keberadaannya. Secara keseluruhan, visi politik merupakan elemen fundamental dalam membangun legitimasi, memandu strategi pembangunan, dan mendorong partisipasi politik yang efektif di Indonesia.

Era Digital dan Media Sosial: Ruang Baru Politik

Era Digital dan Media Sosial telah mengubah lanskap politik dengan menawarkan konektivitas yang cepat, interaktivitas, viralitas, dan partisipasi politik yang lebih luas. Digitalisasi, yang ditandai dengan kemudahan akses informasi, konektivitas global, analisis data besar, AI, dan algoritma, sedang mengubah masyarakat dan aktor politik, mempercepat pengambilan keputusan, dan membuka ruang baru untuk partisipasi. Media sosial, di sisi lain, bersifat interaktif, memungkinkan komunikasi dua arah secara langsung antara politisi dan publik. Viralitasnya memungkinkan pesan politik menyebar dengan cepat dan luas, dan bersifat partisipatif, memungkinkan pengguna untuk secara aktif berkomentar, berbagi, dan membuat konten politik. Misalnya, partai politik seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggunakan media sosial untuk membangun merek politik yang kuat, melibatkan pemilih muda, dan meningkatkan elektabilitas. Kecepatan penyebaran pesan politik media sosial

lebih cepat daripada media konvensional, memungkinkan interaksi langsung, umpan balik, dan pengorganisasian daring. Media sosial juga menawarkan kampanye yang hemat biaya dan lebih mudah diakses oleh berbagai kelompok. Secara keseluruhan, era digital dan media sosial menyediakan ruang transformatif dalam politik, yang ditandai dengan konektivitas cepat, interaktivitas, viralitas, dan partisipasi politik yang lebih luas.

Media sosial telah menjadi alat penting dalam meningkatkan partisipasi politik publik, terutama di kalangan generasi muda. Media sosial menawarkan akses mudah ke informasi politik, memungkinkan pemilih mengakses berita, visi kandidat, dan isu-isu politik terkini tanpa perantara. Media sosial juga memfasilitasi dialog langsung antara pemilih dan politisi, mendorong ekspresi aspirasi, kritik, dan dukungan secara langsung. Pengguna dapat berpartisipasi melalui konten dan diskusi, menciptakan bentuk partisipasi yang lebih inklusif dan kuat. Media sosial juga menyediakan ruang aman untuk berekspresi, terutama bagi pemilih pemula dan kelompok yang kurang terwakili. Media sosial juga memfasilitasi kegiatan politik seperti menyebarluaskan ajakan untuk memilih, membahas pemilu, mengorganisir demonstrasi, dan melakukan kampanye digital, sehingga meningkatkan keterlibatan publik. Efek viralitas dan jangkauan yang luas adalah pesan-pesan politik yang viral dapat menjangkau khalayak yang lebih luas, meningkatkan kesadaran dan memobilisasi partisipasi yang lebih besar dalam pemilu dan gerakan sosial. Partisipasi di media sosial membantu pemilih menjadi lebih siap dan kritis dalam pemungutan suara mereka, karena mereka memiliki lebih banyak informasi dan kesempatan untuk membahas isu-isu politik. Dengan demikian, media sosial menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi politik yang aktif, inklusif, dan demokratis, sekaligus menciptakan ruang publik yang dinamis dan responsif bagi masyarakat untuk menggunakan hak politiknya.

Transformasi Visi Politik Melalui Digitalisasi

Digitalisasi telah mengubah komunikasi politik dari monolog menjadi proses partisipatif dan interaktif, yang memungkinkan politisi dan publik untuk terlibat dalam dialog secara langsung. Hal ini mempersempit jarak antara pemimpin dan rakyat, sehingga meningkatkan keterlibatan publik dalam proses politik. Pencitraan politik digital memungkinkan politisi membangun citra pribadi dan kelembagaan yang kuat di platform seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube, sehingga memengaruhi persepsi publik dengan cepat dan luas.

Kampanye politik kini memanfaatkan berbagai platform media sosial dengan pendekatan tersegmentasi dan digital, seperti Facebook, Twitter (sekarang X), Instagram, TikTok, dan YouTube, untuk menyebarkan pesan, berinteraksi

dengan pemilih, dan memobilisasi dukungan. Data besar dan analitik berperan dalam proses ini, memungkinkan politisi untuk menyusun pesan politik yang lebih terarah dan mempersonalisasi kampanye. Era digital juga membuka ruang bagi siapa pun untuk menyuarakan aspirasi politiknya secara terbuka dan luas, memungkinkan pertukaran informasi dan pandangan dari berbagai lapisan masyarakat tanpa perantara. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas politik, serta memperkuat kendali publik atas pemerintah.

Dampak Media Sosial terhadap Visi Politik

1. Dampak Positif:

- a. Meningkatkan Partisipasi Publik: Media sosial mendorong masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih aktif dalam politik dengan memudahkan akses informasi dan ruang dialog dua arah antara politisi dan pemilih.
- b. Memperluas Jangkauan Visi Politik: Platform media sosial memungkinkan penyebaran visi politik secara luas dan cepat ke berbagai lapisan masyarakat tanpa batas geografis.
- c. Mempercepat Diseminasi Ide dan Kebijakan: Informasi dan kebijakan politik dapat disebarluaskan secara langsung dan instan, memungkinkan respon cepat dari publik.
- d. Mendorong Transparansi: Politisi dan partai lebih mudah diawasi oleh masyarakat karena aktivitas dan pernyataan mereka terekam dan bisa diakses publik secara terbuka.

2. Dampak Negatif:

- a. Polarisasi Politik dan Echo Chamber: Algoritma media sosial cenderung menguatkan kelompok yang sependapat, sehingga memperdalam perpecahan dan polarisasi sosial-politik.
- b. Penyebaran Hoaks dan Misinformasi: Kebebasan berinformasi di media sosial juga membuka peluang penyebaran berita palsu yang dapat menyesatkan dan memecah belah masyarakat.
- c. Politik Identitas yang Semakin Tajam: Media sosial kerap menjadi arena pertarungan identitas yang memperuncing konflik horizontal antar kelompok masyarakat.
- d. Visi Politik Tergeser oleh Konten Populis/Viral: Konten yang viral dan sensasional sering kali mengalihkan perhatian publik dari isu-isu substantif ke hal-hal yang lebih populis dan dangkal.

CONCLUSION

Era digital dan media sosial telah mengubah visi politik secara signifikan, menjadikannya lebih interaktif dan mudah diakses. Pergeseran ini telah memperkuat peran visi politik sebagai pedoman strategis, sumber legitimasi pemerintah, dan instrumen partisipasi publik dalam kehidupan politik. Media sosial berfungsi sebagai platform untuk bertukar gagasan politik, mobilisasi massa, dan citra politik, memperluas jangkauan visi politik, meningkatkan partisipasi pemuda, dan mempromosikan transparansi. Namun, ia juga menghadirkan tantangan seperti polarisasi politik, penyebaran hoaks, politik identitas, dan pergeseran dari visi politik ke konten populis. Literasi digital, regulasi yang tepat, dan komunikasi politik yang etis sangat penting untuk penggunaan ruang digital yang sehat dan produktif. Media sosial dan digitalisasi tidak hanya merupakan alat teknologi tetapi juga instrumen strategis dalam transformasi visi politik, membentuk politik masa depan selama digunakan secara bijak untuk memperkuat demokrasi, menjaga stabilitas, dan mempromosikan partisipasi politik inklusif yang berorientasi pada nilai-nilai nasional.

REFERENCES

- Aurellia, D., & Katimin, K. (2025). Arah Baru Politik di Era Digital (Perspektif Generasi Milenial di Media Sosial). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 231-236.
- Habibah, P. (2023). PERAN KEPEMIMPINAN DALAM TRANSFORMASI SOSIAL-POLITIK MASYARAKAT. *literacy notes*, 1(2).
- Laventia, F., Faizal, A., & Slamet, S. (2025). Pendidikan Politik di Era Digital: Media Sosial sebagai Katalis atau Distorsi?. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), 423-427.
- MJ, M. Z., Mustanir, A., & Jabbar, A. (2024). MEDIA SOSIAL DALAM TRANSFORMASI POLITIK (STUDI KASUS PEMILIHAN LEGISLATIF DAERAH PEMILIHAN 4 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(1).
- Panggabean, I. M., & Yuwono, T. (2025). Transformasi Media Pendidikan Politik di Era Politik Kontemporer melalui Website Bijakmemilih. *id. Journal of Politic and Government Studies*, 14(2), 529-541.
- Romadhona, H., Sadewa, I., & Sutoto, K. A. S. R. (2023). Transformasi Sosial dan Perubahan Politik di Era Digital Serta Dampaknya terhadap Partisipasi Kewarganegaraan. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, 1(3), 119-126.
- Setyarahajoe, R. (2025). *Politik Digital: Transformasi Komunikasi Politik di Era Media Sosial*. Jakad Media Publishing.

Wibowo, A. D. P., Lim, W., & Angkasa, S. (2024). PERAN PARTAI POLITIK DALAM ERA DIGITAL: TRANSFORMASI KAMPANYE KONVENSIONAL KE DIGITAL. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 4(3), 409-414.